

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN STRUKTUR
ORGANISASI PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
(Studi Pada Unit Politik Hukum Keamanan dan Pemerintah Daerah
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang Sebagai Persyaratan Untuk
Mendapatkan Gelar Sarjana (S1)
Ilmu Pemerintahan**



Oleh :

Olly Caesarya Reghina

202010050311121

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN STRUKTUR
ORGANISASI PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH: STUDI PADA
UNIT POLITIK HUKUM KEAMANAN DAN PEMERINTAH DAERAH
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI**

Diajukan Oleh:

Oliv Caesarya Reghina
202010050311121

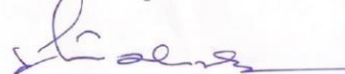
Telah disetujui

Pada hari / tanggal, *Kamis / 20 Juni 2024*

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan


Muhammad Kamil, S.IP., M.A

Pembimbing


Drs. Krishno Hadi, M.A

Mengetahui

Wakil Dekan I FISIP UMM


Najamuddin Khalid Rijal, S.IP., M.Hub.Int

MALANG

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

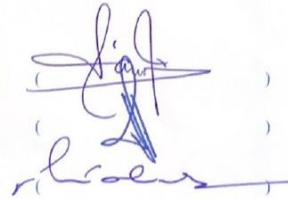
Dipersiapkan dan disusun oleh:

Olly Caesarya Reghina
202010050311121

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
L U L U S
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan
Pada hari Kamis, 20 Juni 2024
Dihadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. Saiman, M.Si
2. Ali Roziqin, S.A.P., MPA
3. Drs. Krishno Hadi, M.A



Mengetahui
Wakil Dekan I P&K (Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)


Najamuddin Khairuz Zilal, S.IP., M.Hub.Int

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

fisip.umm.ac.id | fisip@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Olly Caesarya Reghina
NIM : 202010050311121
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :
Analisis Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Pemerintah Daerah : Studi Pada Unit Politik Hukum Keamanan dan Pemerintah Daerah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Maret 2024
Yang Menyatakan,

Olly Caesarya Reghina

HALAMAN CEK PLAGIASI



LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Kampus III – Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Telp. (0341) 460435 Ext. 243 E-mail: lppi@umm.ac.id

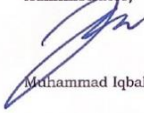
SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Berdasarkan peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada karya ilmiah Mahasiswa di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Telah dilakukan cek orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berikut:

Nama : Olly Caesarya Reghina
NIM : 202010050311121
Judul TA/Skripsi : Analisis Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Lingkup Pemerintah Daerah : Studi Pada Unit Politik Hukum Keamanan dan Pemerintah Daerah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pembimbing : Drs. Krishno Hadi, M.A

Setelah dilakukan cek orisinalitas karya, maka dengan ini menerangkan mahasiswa berikut telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan hasil sebagai berikut:

No	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
1	5%	9%	12%	5%	2%

Administrator,

Muhammad Iqbal, S.Pd

Malang, 10 Juni 2024
Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Muhammad Kamil, S.I.P., M.A

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Lingkup Pemerintah Daerah (Studi Pada Unit Politik Hukum Keamanan Dan Pemerintah Daerah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi)”** dapat diselesaikan oleh penulis dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa rahmat bagi seluruh alam.

Penelitian ini penulis susun sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar pada jenjang Strata-1 (S1) pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusunan skripsi ini penulis lakukan dengan penuh dedikasi, semangat, dan kerja keras serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penelitian. Oleh karena itu pada kesempatan yang telah diberikan ini penulis akan mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Muslimin Machmud, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang
4. Bapak Drs. Krishno Hadi, M.A selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan, motivasi dan membagi ilmu serta masukan dengan sangat baik sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan dalam proses penelitian.

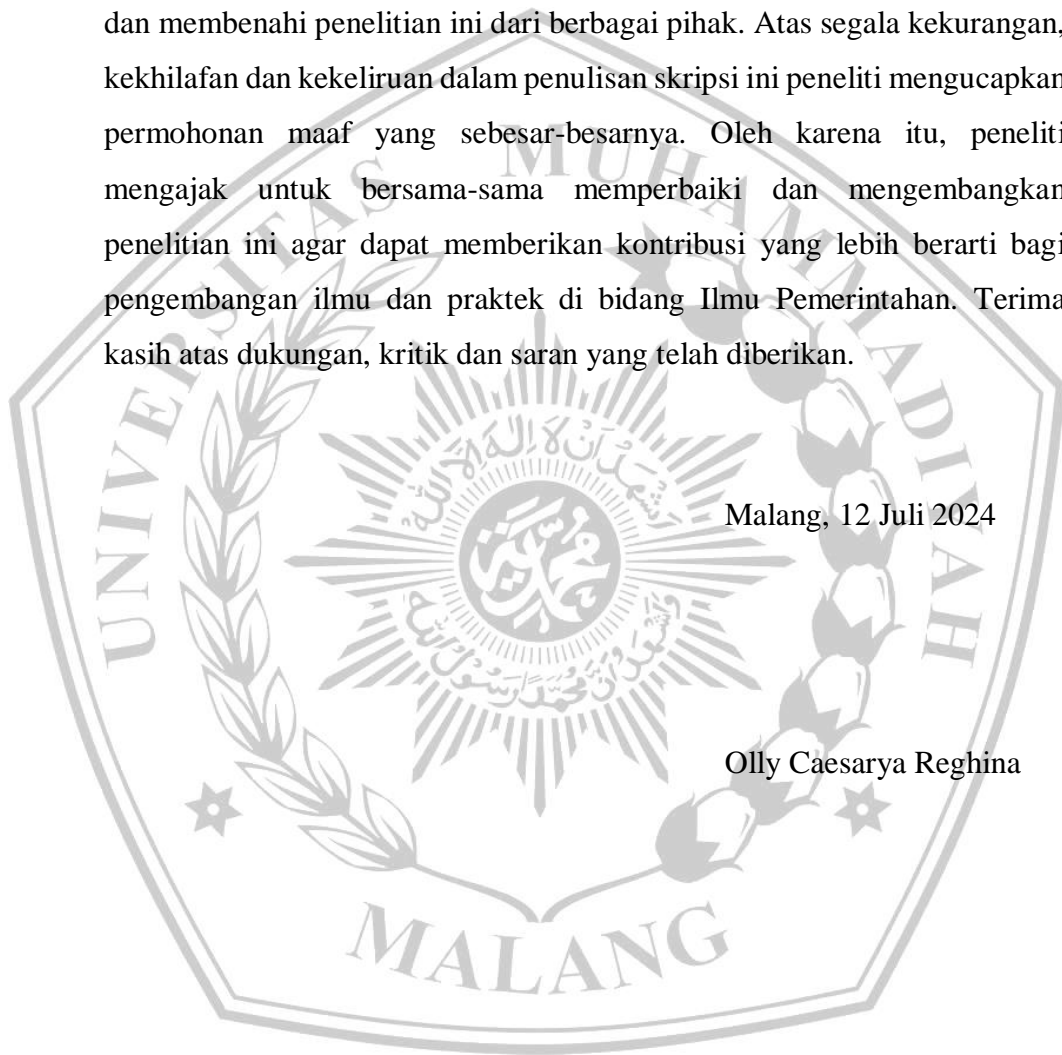
5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan sumbang bakti keilmuan dan segala bentuk pengabdianya
6. Seluruh Staff bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam mengurus administrasi selama masa studi
7. Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Khususnya Unit Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah (POLHUKAM) yang telah menyediakan dan meluangkan waktunya untuk membantu peneliti dalam melengkapi data-data penelitian
8. Cinta pertama dan pintu surgaku yang sangat ku sayangi dengan sepenuh hati Bapak Iswahyudi dan Ibu Rina Diah Suprapti yang dengan setia memberikan dukungan kepada peneliti baik dukungan moril maupun materi, serta doa-doa yang tiada habisnya dipanjatkan untuk peneliti guna kelancaran dalam proses pengerjaan skripsi serta dalam proses penyelesaian gelar Sarjana. Tidak lupa adik kesayangan Oddyta Caesarya Reghyna serta keluarga besar yang juga telah memberikan semangat kepada peneliti
9. Keluarga besar Redjo Soewono, dr. Heri Subianto Sp.BS (K)., FIN beserta istri, Prima Rendra Hartawan beserta istri selaku kakak peneliti dan Keluarga Alm. Bapak Sucipto yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa-doa kepada peneliti
10. Sahabat tercinta Nurmayanda, Amalia Rifdah Rizqiana, Ilmi Tahta A, Amalia Rifdah Frestyata, Adinda Salsabilla Firdaus, Satrio Bagus Pambudi, dan Muhammad Uridho Akbar Firmansyah yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti
11. Sahabat seperjuangan Secret Zoo, sahabat Sepermagangan, serta teman-teman Ilmu Pemerintahan Angkatan 2020 yang telah kebersamai peneliti dengan memberikan dukungannya
12. Terakhir untuk pribadi, terima kasih karena telah menjadi pribadi yang kuat dalam hal apapun, terima kasih karena telah berdiri di atas kaki sendiri, terima kasih karena memilih untuk menerjang terpaan badai yang bertubi-tubi, terima kasih karena telah berusaha sekuat tenaga untuk mencoba

menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terima kasih karena telah mencoba untuk belajar hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman, dan untuk yang terakhir terima kasih untuk tetap hidup dan mencoba untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitar dan orang lain.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan membenahi penelitian ini dari berbagai pihak. Atas segala kekurangan, kekhilafan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini peneliti mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, peneliti mengajak untuk bersama-sama memperbaiki dan mengembangkan penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi pengembangan ilmu dan praktek di bidang Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas dukungan, kritik dan saran yang telah diberikan.

Malang, 12 Juli 2024

Olly Caesarya Reghina



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses Penyederhanaan Struktur Organisasi yang terdapat pada Pemerintah Daerah Provinsi. Latar belakang penelitian ini adalah, peneliti menemukan adanya beberapa hambatan administrative didalam proses penyederhanaan struktur organisasi yang terdapat pada lingkup Pemerintah Daerah Provinsi. Selain itu pada proses penyederhanaan struktur organisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan arahan Presiden untuk melaksanakan pemangkasan pada birokrasi dan penyederhanaan struktur organisasi pada lingkup Pemerintah Daerah menjadi dua level supaya lebih efektif dan fleksibel. Metode yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Proses dan Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini dilakukan dengan turun lapang secara langsung untuk memperoleh informasi melalui informan dan observasi serta melaksanakan wawancara. Sehingga informan yang terdapat didalam penelitian ini adalah Asisten Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata laksana Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah KemenPANRB, Staf Unit Polhukam Pemda KemenPANRB, dan Staf Pengolah Data Biro Organisasi Pemprov Jatim. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KEMENPANRB bersama dengan KEMENDAGRI dalam melaksanakan proses penyederhanaan struktur organisasi pada pemerintah daerah telah berhasil dilaksanakan sampai kepada dua level, yakni memangkas Eselon III, Eselon IV dan dialihkan ke Jabatan fungsional. Namun Ketika diteliti lebih dalam lagi dalam proses penyederhanaan struktur organisasi memiliki faktor penghambat yang mempengaruhi proses penyederhanaan, Dimana masih banyak *misunderstanding* dari aparatur yang ada, serta waktu yang diberikan dalam proses penyederhanaan yang dirasa terlalu singkat. Maka dari itu diharapkan seluruh Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan proses yang terdapat di dalam penyederhanaan, dan dapat membangun komunikasi dan kerja sama antar sesama unit kerja.

Kata Kunci : *Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Struktur Organisasi, KemenPANRB, Pemerintah Daerah Provinsi*

ABSTRACT

The purpose of this research is to see how the process of simplifying the organizational structure in the Provincial Government. The background of this study is that researchers found several administrative obstacles in the process of simplifying the organizational structure within the scope of the Provincial Regional Government. In addition, the process of simplifying the organizational structure carried out by the Regional Government is adjust to the President's direction to carry out cuts in the bureaucracy and simplify the organizational structure within the scope of the Regional Government into two levels to make it more effective and flexible. The method used in this research uses qualitative research. The process and data collection techniques in this research are carried out by going directly to the field to obtain information through informants contained in this study are Assistant Deputy for Institutional and Management of Politics, Law, Security, and Local Government of KemenPANRB, Staff of The KemenPANRB Regional Government Polhukam Unit, and Data Processing Staff of the East Java Provincial Organization Bureau. The results obtained from this study indicate that the efforts made by KemenPANRB together with Kemendagri in carrying out the process of simplifying the organizational structure in local governments have been successfully implemented up to two levels, namely cutting echelon III, echelon IV and being transferred to functional positions. However, when examined more deeply in the process of simplifying the organizational structure, they are inhibiting factors that affect the simplification process, where there are still many misunderstandings from the existing apparatus, as well as the time given in the simplification process which is considered too short. Therefore, it is hoped that all Local Governments can maximize the process contained in simplification, and can build communication and cooperation between fellow work units.

Keywords: *Bureaucratic Simplification, Organizational Structure Simplification, KemenPANRB, Provincial Government.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2023). Problematika Dan Tantangan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Indonesia. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 47–55. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i1.6010>
- Adlini, M. N., D, A. H., Yulinda, S., & Octavia Chotimah, S. J. M. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Pendidikan Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Amanda, I. P. (2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33–37. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Asi, L. L., Gani, A., & Sukmawati, S. (2021). Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional Dan Kinerja Dosen Universitas Negeri Gorontalo. *Journal of Management Science (JMS)*, 2(1), 01–24. <https://doi.org/10.52103/jms.v2i1.295>
- BBC, I. (2020). *Pemilu Amerika: Apa yang dimaksud dengan electoral college?* 12 Agustus. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53733139>
- Beno, J. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (PERSERO) Cabang Teluk Bayur). *Saintek Maritim*, 22(2), 117–126.
- BKN. (2023). *Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Semester I*. 1–89.
- Bojonegoro, B. (2021). *Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur*. 12 April.
- Danil, M., Munjin, A., Seran, G. G., Studi, P., Publik, A., Ilmu, F., Politik, I., Tol, J., No, C., Pos, K., Mahmud, K., & Email, D. (2020). Implementasi Entrepreneurial Government Di Kecamatan Bogor Timur District Bogor City. *GOVERNANSI*, 6(April), 17–26.
- David Osborne, P. P. (1997). *Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha* (Seri Manaj). PPM.
- Dewi, E. P. (2018). Good Governance Dan Transparansi Rencana Strategi Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. *Jurnal Lentera Bisnis*, 7(2), 81. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v7i2.236>

- diskominfo blitar. (2019). *Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD*.
<https://kominfo.blitarkab.go.id/tupoksi-skpd/>
- Diskominfo Jatim. (2023). *Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik Capai 88,81 Predikat Kualitas Tertinggi, Pemrov Jatim Raih Penghargaan Ombudsman RI*. 16 December.
- Ekonomi, B. (2023). *Family Gathering Biro Perencanaan Setdaprov Jawa Timur*. 28 November. <https://ro-ekonomi.jatimprov.go.id/berita/1699452003-family-gathering-biro-perencanaan-setdaprov-jatim-di-batu-malang>
- Fahrudin, S. (2020). Pengaruh Perilaku Dan Budaya Organisasi Terhadap Etos Kerja Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri. *Edum Journal*, 3(1), 59–71.
<https://doi.org/10.31943/edumjournal.v3i1.55>
- Girsang, W. sari. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Terhadap Kinerja Karyawan RS Putri Hijau No. 17 Medan. *AJIE-Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 04(02), 159–170.
- Guides, S. L. (2021). *Structure of the United States Federal Government*. January 20. <https://simplelegalguides.com/blogs/simple-legal-guides-blog/organization-chart-for-the-united-states-federal-government>
- Hannan Abd, B. (2021). Problem Politik Kabinet Koalisi ; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik. *Journal of Social Community*, 6(14), 49–69.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Akademik*, 1, No.03(November), 13–25.
<http://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>
- Ika Widiastuti. (2023). Strategi Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah Melalui Model The Professional Bureaucracy di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 09(2), 886–890.
<http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/Aksara>
- Jatim, B. (2018). *Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Desember 2018*. 27 Desember.
<https://jatim.bps.go.id/statictable/2020/03/27/2080/jumlah-pegawai-negeri->

sipil-menurut-jabatan-dan-jenis-kelamin-di-pemerintah-provinsi-jawa-timur-
desember-2018.html

Jatim, P. (2022). *SuKma-e JATIM*.

Kemenpan-RB. (2021). *Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota*. https://ro-organisasi.jatimprov.go.id/PBirokrasi/download/Rekomendasi_Kebijakan_Penyederhanaan_Birokrasi_di_Daerah.pdf

Kemenpanrb. (2020). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Startegis Kemenpanrb Tahun 2020-2024*. 1–63. [https://jdihn.go.id/files/519/Peraturan Menteri PANRB No. 49 Tahun 2020.pdf](https://jdihn.go.id/files/519/Peraturan_Menteri_PANRB_No._49_Tahun_2020.pdf)

Kemenpanrb. (2023). *Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional*. 1–82.

KEMENPANRB. (2019). *Langkah Strategis Penyederhanaan Birokrasi*. 18 November. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/langkah-strategis-penyederhanaan-birokrasi>

KEMENPANRB. (2021). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi*.

Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>

kesbangpol kulon Progo. (2022). *Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pada Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik*. <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/478/kebijakan-penyederhanaan-birokrasi-pada-kelembagaan-badan-kesatuan-bangsa-dan-politik#:~:text=Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan,untuk mengurangi tingkatan unit organisasi>

Kpanrb. (2019). *Tingkat Penilaian AKIP (Rating)*.

- KPANRB. (2020). *Birokrasi dan Manajemen ASN di Masa Depan*.
<https://doi.org/10.1109/nana.2019.00007>
- KPANRB. (2023). *Kementerian PANRB Apresiasi KOVABLIK, Jawa Timur Disebut sebagai 'Gudang Inovasi Pelayanan Publik.'* 23 November.
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-apresiasi-kovablik-jawa-timur-disebut-sebagai-gudang-inovasi-pelayanan-publik>
- Kristian A.T. Pongdatu, Welly Waworundeng, B. N. (2023). Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Edunomika*, 7(2), 1–16.
- Lina Dewi, K., Warsono, H., Puspo Priyadi, B., Sunu Astuti, R., & Afrizal, T. (2022). Analisis Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang. *Perspektif*, 11(4), 1487–1491.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6305>
- Maulana, D., Nurasa, H., & Karlina, N. (2022). Implementasi Program Penataan dan Penguatan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 59.
<https://doi.org/10.24198/responsive.v5i2.41154>
- MKRI. (2019). *Undang-Undang Dasar tahun 1945*.
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45ASLI.pdf>
- Nisa, L. S., Sri Setyati, Maliani, Dewi Siska, & Siska Fitriyanti. (2022). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(2), 167–184. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i2.284>
- Nur, A. C. (2019). Analisis Kebijakan Publik. *Analisis Kebijakan Publik*, April, 1–23.
- Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda. *Jurnal Mahasiswa*, 1(2), 117–128.

- file:///C:/Users/Assus/Downloads/94-Article Text-144-2-10-20211209.pdf
- PANRB, K. (2013). *Jejak Langkah & Kiprah Pengabdian Kementerian PANRB*. 21 August. <https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/kiprah-pengabdian-kementerian-panrb>
- Pemprov, J. (2018). *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timmur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Keja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur*. <https://doi.org/10.1016/j.jns.2018.09.022><http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2009.04.058><http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2015.10.001><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2854659&tool=pmcentrez&rendertype=abstract><http://w>
- Pemprov, J. (2022). *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur*.
- Primasari, I. F. N. D., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Terkait Standar Penilaian di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1479–1491. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/956>
- Purnama Irma, Gedeona T Hendrikus, & Nurliawati Nita. (2022). Strategi Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung. *Jurnal Pengabdian Mandiri, Volume 1*(4), 643–664.
- Putra, A. P., & Maulana, A. (2022). Reformasi Birokrasi Dalam Merespon Climate Change Pada Green Economy Desa Ngingas Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 377–397. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2390>
- Rahmanda, V., Nasution, M. I. P., & dalam Susiawati. (2022). Analisis Motiviasi dan Kinerja pada Penyederhanaan Birokrasi di Kantor Walikota Binjai. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1684–1688.

- Rakhmawanto, A. (2021). Analisis Dampak Perampangan Birokrasi Terhadap Penyetaraan Jabatan Administrator Dan Pengawas. *Civil Service*, 15(2), 11–24.
- RI, B. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i3.139>
- Rifa'i, A. (2019). *Proses Pengambilan Keputusan*. 1–12.
- Rikza, M. F. (2022). Otonomi Daerah Dan Reformasi Birokrasi. *Public Service and Governance*, 03(01), 80–86.
- Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>
- Rusliandy. (2022). Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 53–70.
- Samosir, P., Achmad, M., & Sinurat, M. (2022). Analysis Of The Implementation Of The Policy For Equalizing Certain Functional Positions In The Regional Personnel, Education And Training Agency For The City Of Kupang, East Nusa Tenggara Province. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(6), 3738–3744. <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Setiawan, I., Sururama, R., & Nurdin, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Organisasi Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), 12–25. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2380>
- Siroto, I., & Atmaja, hamdan tri. (2020). Reformasi Tahun 1998 : Peranan Dan Dampaknya Bagi Kota Solo. *Journal of Indonesian History*, 9(2), 100–107.
- Sri Adriana. (2022). Problematika Perampangan Jabatan Aparatur Sipil Negara Menuju Perampangan Birokrasi. *Jurnal Sultan : Riset Hukum Tatanegara IAIN Parepare*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3178>
- Susiawati, M. (2021). Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Untuk Mewujudkan Birokrasi Profesional Studi Kasus Perampangan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Widiya Praja*, 1(2), 1–10.

- Sutoro, M., Mawardi, S., & Sugiarti, E. (2020). Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi, Budaya Organisasi, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(4), 411–420. <https://doi.org/10.37481/sjr.v3i4.267>
- Syahrial, M. (2022). *Penyebab Jumlah PNS Semakin Menurun Menurut BKN*. 06 Maret. <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/03/06/183000081/penyebab-jumlah-pns-semakin-menurun-menurut-bkn?page=all>
- Tulodo, B. A. R., & Solichin, A. (2019). Analisis Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi dan Perceived Usefulness terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi Care dalam Upaya Peningkatan Kinerja Karyawan (Studi Kasus PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk.). *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*, 10(1), 25–43.
- Udiyati Ardiani, S. (2021). Evaluasi Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal of Indonesian Rural Adn Regional Government (JIRReG)*, 5, 148–162. <https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/view/12619>
- Vivin Ismiyati Wardah, Kawulusan, B., & Marsanuddin. (2023). Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Bagi Pengawas. *Prosiding Seminas Nasional Ekonomi Dan Bisnis Ke-III*, 140–148.
- Wakhid, A. A. (2011). Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *Jurnal TAPIS*, 7(2), 125–146. <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/100>
- Wibowo, A. A., & Kertati, I. (2022). Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik. *Public Service and Governance Journal*, 3(01), 01. <https://doi.org/10.56444/psgj.v3i01.2785>
- Yogyakarta, P. (2023). *Pemkot Yogya Raih Penghargaan Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Terbaik*. 06 Desember. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/30640>
- Yusriadi. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 8(2), 178.

<https://doi.org/10.31289/jap.v8i2.1824>

Yusuf, A. P., & Saragih, D. P. (2021). Upaya Birokrasi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal Sekitar Taman Nasional Wasur. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 10(1), 40–53.
<https://doi.org/10.35724/sjias.v10i1.3263>

Zulfia, H., & Frinaldi, A. (2022). Urgensi Penerapan Budaya Inovasi Bagi Asn Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Publik Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(1), 1–11.
<https://doi.org/10.31506/jipags.v7i1.17555>



DAFTAR ISI

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN CEK PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR PUSTAKA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Definisi Konseptual.....	14
1.6 Definisi Operasional	18
1.7 Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1 PENELITIAN TERDAHULU	26
2.2 KERANGKA TEORI.....	32
BAB III DESKRIPSI WILAYAH	41
3.1 Gambaran Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	41
3.2 Gambaran Umum Deputi Bidang Kelembagaan Dan Tata Laksana	53
3.3 Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	57

3.4 Potensi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Strategi Inti : Kebijakan Pada Proses Penyederhanaan	61
1. Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi.....	61
2. Kejelasan Tujuan Penyederhanaan Birokrasi	65
3. Kejelasan Tujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi	69
4. Perkembangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi.....	72
B. Strategi Konsekuensi : Konsekuensi Yang Dihadapi Serta Kinerja Organisasi Pada Penyederhanaan Struktur Organisasi	75
C. Strategi Pelanggan : Membangun Hubungan Yang Bertanggung Jawab Dan Berorientasi Pada Kepuasan	80
D. Strategi Kontrol : Meningkatkan Jangkauan Pengendalian Dan Pengambilan Keputusan Untuk Kinerja Optimal	83
E. Strategi Budaya : Menyelaraskan Nilai dan Praktik Organisasi Untuk Membangun Fondasi Kebudayaan Yang Kuat	90
BAB V KESIMPULAN.....	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran	97
LAMPIRAN.....	99
Lampiran 1.2 Gambar Struktur Organisasi Negara Amerika Serikat	99
Lampiran 4.2 Gambar Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur	100
Lampiran 4.3 Gambar Layout Hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi	101
Lampiran 4.2 Tabel Nilai RB Provinsi	101
Lampiran 4.5 Perkembangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Tahap I.....	104
Lampiran 4.6 Perkembangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Tahap II	106

**Lampiran 4.7 Perkembangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Tahap III108**

**Lampiran 4.8 Perkembangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Tahap IV108**

**Lampiran 4.9 Desain Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur109**



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	5
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Negara Indonesia	9
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	48
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana.....	53
Gambar 4.1 Proses Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah	62
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.....	87
Gambar 4.5 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.....	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah PNS pada Instansi Pusat dan Daerah Tahun 2022-2023	3
Tabel 1.2 Daftar PNS 5 Tahun Terakhir	4
Tabel 2.1 Lima Strategi David Osborne dan Peter Plastrik	34
Tabel 4.1 Jumlah PNS Pemerintah Daerah Dan Pusat	64
Tabel 4.3 Komponen Dalam Penyederhanaan Birokrasi	70
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan	71
Tabel 4.10 Hasil Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.....	82

